

## Penguatan Nilai-Nilai Hibua Lamo Pada Masyarakat Kabupaten Halmahera

<sup>1</sup>Sosiawaty, M. <sup>2</sup>Kausar Bailusy, <sup>3</sup>Gustiana A. Kambo

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin, Makassar. email: [sosiawatymasrul@gmail.com](mailto:sosiawatymasrul@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.  
email: [muhkausar52@gmail.com](mailto:muhkausar52@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar  
email: [gustiananakambo@gmail.com](mailto:gustiananakambo@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) menggambarkan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dalam proses politik di Halmahera Utara dan (2) menggambarkan dan menganalisis internalisasi masyarakat dalam memahami nilai-nilai Hibua Lamo yang dihadirkan kembali oleh tokoh masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dengan merevitalisasi nilai-nilai tersebut yang dilakukan oleh elit dan tokoh masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilatarbelakangi keresahan melihat dampak kehancuran yang disebabkan oleh konflik horisontal yang terjadi pada tahun 1999. Upaya merevitalisasi nilai-nilai Hibua Lamo tersebut dengan melalui kekuatan konstruksi sosial yang menciptakan realitas sosial yang memiliki tujuan dan motivasi yang dalam aspek politik dapat dimaknai dalam rangka memperoleh legitimasi untuk meraih kekuasaan melalui hegemoni produksi wacana nilai-nilai kebudayaan (Hibua Lamo).

**Kata Kunci:** Nilai-nilai Hibua Lamo, Konflik Horisontal, Revitalisasi, Konstruksi sosial.

### Abstract

This research aims to (1) describe and analyze the efforts undertaken by the community to bring back the values of Hibua Lamo in the political process in North Halmahera and (2) describe and analyze the internalization of the values of Hibua Lamo to understand by the society which was represented by community leaders. This research was conducted in Tobelo, North Halmahera Regency, North Maluku Province. The results show that there are efforts to bring back the values of Hibua Lamo by revitalizing those values by elites and community leaders. These efforts are motivated by the concerns of the destruction caused by the horizontal conflict that occurred in 1999. Efforts to revitalize the values of Hibua Lamo is through the power of social construction that creates a social reality that has a purpose and motivation that in the political aspect can be interpreted in order to gain legitimacy and power through the hegemony of cultural discourse production values (Hibua Lamo).

**Keywords:** Hibua Lamo, Horizontal Conflict, Revitalization, Social Construction

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen dengan beragam budaya yang berbeda. Konsekuensi dari budaya yang beragam ini adalah masyarakat yang rentan terjadi friksi ataupun konflik yang salah satunya sebagai akibat terjadinya gesekan-gesekan antar kelompok masyarakat dalam rangka

mempertahankan eksistensi budaya masing-masing.

Maluku Utara termasuk daerah yang juga pernah merasakan pahitnya konflik. Halmahera Utara, salah satu kabupaten di Maluku Utara, justru nyaris hancur akibat konflik. Hampir separuh kota terbakar habis. Konflik Horizontal bernuansa SARA yang terjadi di Halmahera dan sekitarnya pada tahun 1999-2000 tersebut,

telah menorehkan noktah hitam dalam sejarah masyarakat Halmahera dan masyarakat Halmahera Utara pada khususnya. Kehidupan masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan tersebut telah tercoreng oleh konflik yang telah memporak-porandakan tatanan dan struktur sosial masyarakat.

Salah satu pencetus konflik di Halmahera Utara adalah PP No. 42 Tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Malifut. Di Kecamatan Malifut banyak berdomisili orang-orang yang berasal dari etnis Makian yang berasal dari 16 desa yang ada di Pulau Makian. Mereka dipindahkan ke Halmahera Utara di suatu daerah yang bernama Malifut karena peristiwa meletusnya gunung Kie Besi di Makian pada tahun 1975. Peraturan Pemerintah no 42 tahun 1999 tersebut tidak mendapat respon positif dari lima desa yang ada di kecamatan Kao yang berada di Malifut. Inilah cikal bakal konflik horisontal di Halmahera Utara yang awalnya karena masalah perebutan wilayah antara suku Makian di Malifut dan suku Kao, pada akhirnya merembet ke seluruh Halmahera Utara dan berkembang menjadi konflik agama karena masing-masing kelompok membawa simbol-simbol agama (Puasa, 2013).

Perseteruan yang demikian menurut Stewart dalam (Amirrachman. ed., 2007) karena masing-masing kelompok menganggap mereka masuk dalam common culture baik secara etnis atau agama dan berseteru untuk sebuah cultural autonomy.. Perseteruan dalam konteks yang demikian menyebabkan konflik yang terjadi di Indonesia seringkali digambarkan secara primordial sebagai konflik etnis atau agama. Konflik ini menimbulkan kerugian baik materil dan non materil yang sangat besar bagi masyarakat yang bersangkutan dan menghambat proses pembangunan di daerah tersebut.

Kehancuran yang diakibatkan oleh Konflik tersebut mendorong masyarakat untuk

melihat kembali nilai-nilai adat dan tradisi sebagai sumber konsensus dan keadilan guna menjaga perdamaian dan harmonisasi dalam masyarakat.

Nilai-nilai Hibua Lamo kembali dihidupkan dan dilembagakan dengan membentuk kembali pemerintahan adat yang dipimpin oleh seorang Jiko Makolano (raja). Peran sebagai Jiko Makolano diamanatkan kepada Hein Namotemo yang juga adalah bupati Halmahera Utara.

Pemaparan di atas menimbulkan pertanyaan tentang upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dalam proses politik di Halmahera Utara.

## II. METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Dasar penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan etnograf. Studi etnografi (ethnographic studies) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif (Barker, Terj., 2006). Penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penulis berusaha mendeskripsikan upaya-upaya menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dalam proses politik dan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam masyarakat Halmahera Utara itu sendiri. Penelitian berlangsung di Kota Tobelo yang merupakan ibukota Kabupaten Halmahera Utara.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan catatan seorang etnografi, observasi dan wawancara. Sumber data dan jenis data yang terdiri atas katakata dan tindakan, sumber tertulis, foto. Catatan

etnografi yaitu penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sekunder yang merupakan data tertulis dari objek yang diteliti. Dokumen ini berupa dokumen publik seperti koran, makalah maupun artikel atau dokumen pribadi seperti buku harian, maupun catatan sang peneliti mengenai penelitian tersebut. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pengamatan langsung di lapangan. Wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara pewawancara dan informan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang secara langsung diperoleh dari informan melalui teknik wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai bahan pustaka, seperti dokumen, literatur seperti buku, artikel, hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **Teknik Analisa Data**

Data yang penulis peroleh di lapangan dianalisis dengan prinsip metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data-data tersebut lalu direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan yang sudah divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan data yang diperoleh dari informan dan interpretasi peneliti terhadap data lapangan tersebut.

Analisis deskriptif dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tiga alur kegiatan ini adalah: (1) klasifikasi data, (2) agregasi data, dan (3) menyusun pernyataan pokok. Dari tiga alur ini

diharapkan dapat membuat data menjadi bermakna.

### **III. HASIL PENELITIAN**

Ide untuk menghadirkan kembali budaya Hibua Lamo dilatarbelakangi oleh konflik horisontal yang terjadi di Halmahera Utara pada tahun 1999. Konflik bernuansa SARA yang teraktualisasi dalam bentuk kekerasan yang terjadi di Halmahera Utara telah menyisakan banyak penderitaan dan kerugian materil dan non materil tidak hanya terhadap para aktor dan para pelaku, tetapi juga terhadap masyarakat. Konflik ini diwarnai isu SARA, antara masyarakat Muslim dan non Muslim (Kristen), dan juga antara beberapa suku yang mendiami bumi Halmahera Utara (Naleng, 2015).

Mengingat dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah konflik sangat meresahkan, maka wajar jika secara alamiah setiap orang ataupun masyarakat dimanapun berada akan berupaya untuk mencegah atau menghindari terjadinya konflik dan kekerasan. Salah satu contohnya dapat dilihat misalnya dari konflik yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Sejak awal meletusnya konflik Poso tahun 1998, sebagian besar masyarakat telah secara mandiri membangun inisiatif untuk mengakhiri konflik dan berusaha mencegah terjadinya konflik yang lebih besar (Rozi Dkk, 2006).

Rekonsiliasi sebagaimana yang diupayakan di Poso juga terbangun di Halmahera Utara. Berbagai pihak secara terus menerus dan bersinergi mengupayakan menurunnya pertikaian demi terwujudnya perdamaian di bumi Halmahera Utara.

Perdamaian yang berangsur-angsur pulih bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan cara alamiah melainkan melalui upaya-upaya dan intervensi berbagai pihak, antara lain pemerintah, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat adat yang bersinergi untuk senantiasa menjaga dan memelihara rekonsiliasi dan perdamaian yang telah dicapai sampai saat ini.

Dari pemaparan di atas dapat dinyatakan bahwa konflik yang terjadi di Halmahera Utara merupakan bagian dari lahirnya pemikiran untuk merevitalisasi nilai-nilai adat Hibua Lamo. Penguatan nilai-nilai Hibua Lamo ini merupakan salah satu resolusi konflik yang ditempuh oleh tokoh-tokoh masyarakat dan elit dalam membangun Halmahera Utara yang damai.

Nilai-nilai adat Hibua Lamo oleh sebagian kalangan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi konflik di bumi Halmahera Utara. Ini dimungkinkan karena Hibua Lamo mengandung nilai-nilai luhur yang sejalan dengan nilai-nilai demokratis seperti nilai O Adili dan O Diai. Frans Wilson Kuat dalam (Duan, 2010).

O Adili yang memiliki makna keadilan yang di dalamnya terkandung makna kesetaraan derajat, harkat dan martabat, kesetaraan hak dan kewajiban dihadapan aturan-aturan normatif yang diakui dan diterima sebagai hukum adat yang sangat dijunjung. Segala aktifitas dalam kehidupan bersama dilaksanakan secara bijaksana dan penuh kehati-hatian sehingga berbagai bentuk kesetaraan seperti yang telah disebutkan di atas tidak terganggu ataupun dilecehkan. Kecurangan, penipuan dan perbuatan lainnya yang melanggar norma adat sebagai wujud ketidakadilan sangat dikecam. Setiap anggota wajib memelihara kesetaraan dan keseimbangan untuk menciptakan suasana keadilan dalam masyarakat.

Sedangkan O Diai menunjukkan adanya kebenaran, nilai kebenaran ini erat kaitannya dengan O Adili. Norma yang diterima, disepakati dan dihargai sebagai yang benar merupakan salah satu kriteria yang menata kehidupan masyarakat. Kebenaran merupakan norma yang menentukan bahwa “ya: di atas yang benar dan tidak: di atas yang salah”. Implementasi dari O Diai dalam kehidupan bersama pada masyarakat Hibua Lamo

tercermin lewat pengambilan keputusan dalam perkara-perkara dimana para ketua adat selalu tegas tanpa pandang bulu dalam menentukan keputusan. Mereka dengan tegas tetap memberi sanksi walaupun yang menjadi terdakwa adalah salah satu anggota keluarga mereka sendiri, sehingga kebenaran yang diikuti keadilan benar-benar merata dalam tatanan Hibua Lamo.

#### IV. PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak konflik di Halmahera Utara yang membawa kehancuran dan penderitaan membuat masyarakat sadar dan mulai melihat kembali kepada budaya sebagai sumber konsensus dan keadilan. Pluralitas masyarakat Halmahera dengan beragam suku, etnik, agama dan budaya, sebenarnya menjadi sebuah kekayaan masyarakat yang produktif ketika pluralism menjadi sebuah kesadaran bersama (*collective consciousness*) sebagaimana yang dikatakan Zuli Qadir dalam (Poerwidagdo, 2003), namun dapat menjadi lahan subur bagi tumbuhnya benih permusuhan ketika yang muncul di tengah masyarakat adalah kebencian dan keangkuhan antara satu dengan yang lain.

Upaya untuk merevitalisasi atau pun menguatkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo dapat dilihat pada peristiwa tanggal 19 April 2001 yang berlangsung di Lapangan Hibua Lamo Tobelo yang menjadi awal diadakannya kembali nilai-nilai adat Hibua Lamo dalam masyarakat. Dalam pertemuan tersebut pihak-pihak yang berseteru menandatangani naskah deklarasi damai. Penandatanganan deklarasi damai ini disaksikan oleh Kepala Wilayah Hein Namotemo, Ketua Sinode GMIH Pdt. Aesh, Komandan Yonif Infantri 742 Mayor Inf. Ruliansyah, Komandan Marinir Letkol Mar. M. Alpan dan Gubernur Maluku Utara pada waktu itu Abdul Muhyie Efendi (Taher & Widodo, 2014).

Selain menggagas perdamaian melalui pendekatan budaya, upaya

merevitalisasi nilai-nilai Hibua Lamo terus diupayakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Hibua Lamo dalam aspek pemerintahan. Setelah Hein Namotemo terpilih sebagai bupati Halmahera Utara, penguatan-penguatan nilai tersebut terus diupayakan oleh pemerintah selama dua periode kepemimpinannya sebagai bupati Halmahera Utara.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam menghadirkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo, merupakan bagian dari solusi untuk memelihara rekonsiliasi dan perdamaian di bumi Halmahera Utara. Hibua Lamo dihadirkan kembali sebagai identitas bersama masyarakat Halmahera Utara. Menurut Charles F. Andrain (1992) dapat memberi masyarakat di wilayah tertentu suatu perasaan solidaritas sosial. Usaha untuk merevitalisasi nilai-nilai tersebut tidak terlepas dari pengaruh kelompok-kelompok yang berkuasa dalam melahirkan dan menguasai reproduksi wacana revitalisasi nilai-nilai budaya tersebut.

Dalam konteks merevitalisasi nilai-nilai Hibua Lamo, apa yang dilakukan Hein Namotemo yang merupakan salah seorang elit politik, inilah yang dimaksud oleh Berger (1990) sebagai realitas sosial yang dikonstruksi melalui proses eksternalisasi. Eksternalisasi nilai-nilai Hibua Lamo dimungkinkan melalui kekuasaannya sebagai Bupati Halmahera Utara yang memberinya otoritas kontrol terhadap birokrasi dan menjadi kekuatan pendukung dalam usaha menguatkan kembali nilai-nilai Hibua Lamo. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dijadikan kekuatan utama dalam mendukung proses penguatan nilai-nilai Hibua Lamo.

Berger (1990) juga mengatakan bahwa setiap realitas sosial yang dikonstruksi memiliki tujuan-tujuan politis tertentu sehingga realitas sosial dapat dilihat sebagai perilaku sosial yang memiliki makna subjektif. Perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Dari perspektif politik, revitalisasi nilai-nilai

Hibua Lamo sekaligus menjadi sumber legitimasi bagi penguasa dan juga dijadikan sebagai salah satu bentuk akumulasi kekuasaan. Legitimasi menurut Berger (1990) akan diperlukan jika berbagai obyektivasi tatanan kelembagaan akan diserahkan atau dialihkan kepada generasi yang baru. Sebagai sesuatu yang sudah historis, lembaga-lembaga yang sudah jelas dengan sendirinya itu tidak lagi dapat dipertahankan lewat ingatan dan pembiasaan individu itu sendiri. Legitimasi menjelaskan tatanan kelembagaan dengan memberikan kesahihan kognitif kepada makna-maknanya yang sudah diobyektivasi. Legitimasi membenarkan tatanan kelembagaan dengan memberikan martabat normatif kepada perintah-perintahnya yang praktis. Keberhasilan Hein terpilih kembali sebagai bupati Halmahera Utara pada pilkada tahun 2010, menurut penulis tidak terlepas dari kemampuannya untuk merekonstruksi nilai-nilai Hibua Lamo sehingga memperoleh legitimasi dari masyarakat Halmahera Utara.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Gagasan penguatan budaya Hibua Lamo dengan merevitalisasi nilai-nilai adat Hibua Lamio didasari adanya konflik horisontal bernuansa SARA yang melanda Halmahera Utara antara tahun 1999-2001. Nilai-nilai Hibua Lamo tersebut dikonstruksi kembali sebagai identitas bersama rakyat Halmahera Utara sebagai resolusi konflik yang terjadi. Tanggal 19 April 2001 yang menjadi awal diadakannya kembali nilai-nilai adat Hibua Lamo dalam masyarakat. Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Lapangan Hibua Lamo tersebut pihak-pihak yang bersetu menandatangani naskah deklarasi damai yang antara lain memuat kesepakatan diantara pihak-pihak yang bertikai untuk tidak lagi bermusuhan dan bertikai di wilayah Hibua Lamo. Selanjutnya nilai-nilai Hibua Lamo dikonstruksi menjaga rekonsiliasi menciptakan perdamaian sekaligus sebagai

sumber legitimasi bagi elit yang berkuasa pada saat itu.

Untuk menambah bobot legitimasi nilai-nilai Hibua Lamo perlu diupayakan agar nilai-nilai tersebut diakomodir dalam peraturan daerah. Saran penulis ke depannya nilai-nilai ini bisa dimasukkan dalam peraturan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirrachman, Alpha (ed). (2007). *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta. ICIPT bekerjasama dengan Komisi Eropa. Hal. 197
- Andrain, Charles F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. dari buku asli berjudul *Political Life and Social Change*. Penerjemah Luqman Hakim. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. Hal. 76
- Barker, Chris. 2006. *Cultural Studies; Teori dan Praktik (Terj.)*. Penerjemah Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Hal. 29
- Berger, Peter L and Thomas Luckmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, terj. Hasan Basari dari *The Social Construction of Reality: A Treatise in Sociologi of Knowledge*. Jakarta. LP3S. Hal. 40-41, 56.
- Duan, SS. 2010. *Hein dan Hibualamo: Tobelo Pos Menelusuri Jejak Kepemimpinannya*. Tobelo: Tobelo Pos dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. hal. 38.
- Naleng, Adrian Yoro 2013. *Politik Identitas: Jurnal UNIERA*, volume 2. Hal. 119.
- Puasa, Anselmus. (2013) *Falsafah Hibualamo; Suatu Upaya Membangun Rekonsiliasi di Halmahera Utara*. *Jurnal Uniera* Volume 2 nomor 1 Februari 2013. Diakses di [Journal.Uniera.ac.id](http://Journal.Uniera.ac.id).

update tanggal 15 September 2015. Hal. 8

Poerwidagdo, Judo.( 2003). *Mendayung Juanga*, Jakarta:PPRT. Hal. 91

Rozi, Syafuan, Dhurorudhin Mashad Dkk, (2006). *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI. Hal. 76-77.

Taher, Muhammad Bin., & Bambang Widodo,( 2014), *Higaro, Meretas Asa Menggapai Harapan (Dalam Perspektif Kepemimpinan Hein Namotemo)*, CV. Koridor Mitra Media. Hal. 12-13.